

Dari Partisipasi Menuju Pasifikasi: Analisis *Topic Modeling* Wacana *Mindfulness* sebagai Alat Depolitisasi Kebijakan Publik di Platform X

Rury Ramadhan¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia

Email: rury.ramadhan@unpacti.ac.id

Keyword: Policy
Depoliticization, Mindfulness,
Civic Pacification,
Computational Grounded
Theory, Platform X

Abstract: This study examines the convergence between popular psychological ethics (mindfulness, pop-stoicism, and therapeutic discourse) and controversial public policy contestations on Platform X in Indonesia. Employing a Computational Grounded Theory (CGT) framework combining neural class-based TF-IDF (c-TF-IDF) topic modeling, Robert M. Entman's framing analysis, and longitudinal temporal analysis, we investigate a corpus of 7,195 cleaned tweets curated through a five-stage sanitization pipeline spanning 2014–2026. The findings reveal five dominant thematic clusters: Civic Apathy (38.5%), Therapeutic 'Healing' Discourse (28.9%), Neoliberal Responsibilization (13.7%), Protest Tone-Policing (13.2%), and Fiscal Burden Fatalism (5.7%). Methodological triangulation confirms robust validity with a Topic Diversity score of 0.8000, Silhouette Semantic score of 0.1232, and Inter-coder Reliability Cohen's Kappa $\kappa = 0.8297$. Statistical temporal anomaly detection (Z -score > 2.0 ; $p < 0.05$) demonstrates that surges in pacification rhetoric coincide directly with national regulatory crisis moments (Omnibus Law $Z = 8.05$; Emergency Warning Regional Elections Bill $Z = 7.56$; 12% VAT controversy $Z = 4.36$). Functioning through discursive arena-shifting and responsibilization, mindfulness discourse privatizes state structural failures into individual emotional self-regulation, depoliticizing the digital public sphere and pacifying active civic participation. Nonetheless, the study also uncovers passive civic resistance through the counter-appropriation of 'frugal living' as an economic boycott strategy.

Kata Kunci: Depolitisasi
Kebijakan, Mindfulness,
Pasifikasi Kewargaan,

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perjumpaan antara etika psikologis populer (mindfulness, stoikisme pop, dan wacana terapeutik) dengan kontestasi kebijakan publik kontroversial di Platform X di Indonesia. Menggunakan pendekatan *Computational Grounded Theory* (CGT) yang memadukan pemodelan topik saraf (neural c-TF-IDF), analisis *framing* Robert M. Entman, dan analisis deret waktu, penelitian ini menginvestigasi korpus 7.195 cuitan bersih hasil protokol sanitasi lima tahap sepanjang periode 2014–2026. Hasil penelitian mengungkap lima kluster tematik utama: Apatisme Partisipasi Kewargaan (38,5%), Wacana Terapeutik 'Healing' (28,9%), Neoliberal Responsibilization (13,7%), Tone-Policing Protes (13,2%), dan Fatalisme Pajak/Beban Fiskal (5,7%). Triangulasi metodologis menunjukkan validitas tinggi dengan skor *Topic Diversity* 0,8000, *Silhouette* Semantik 0,1232, dan Reliabilitas Antar-Pengkode Cohen's Kappa $\kappa = 0,8297$. Uji deteksi anomali temporal (Z -score $> 2,0$; $p < 0,05$) membuktikan bahwa eskalasi narasi ketenangan batin berkorelasi langsung dengan momentum guncangan regulasi nasional (UU Cipta Kerja $Z = 8,05$; Peringatan Darurat RUU Pilkada $Z = 7,56$; Polemik PPN 12% $Z = 4,36$). Beroperasi melalui mekanisme *discursive arena-shifting* dan *neoliberal responsibilization*, wacana *mindfulness* memprivatisasi kegagalan struktural negara menjadi problem pengelolaan emosi individu, sehingga mendepolitisasi ruang publik

digital dan mentranslasikan potensi partisipasi kritis warga menuju kepasifan fatalistik. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi resistensi pasif warganet melalui reartikulasi '*frugal living*' sebagai strategi boikot ekonomi alternatif.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta jiwa atau sekitar 79,5 persen dari total populasi, menempatkan Indonesia sebagai salah satu ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara (APJII, 2024). Di antara berbagai platform digital yang tersedia, Platform X (sebelumnya Twitter) bertahan sebagai arena utama pembentukan opini publik dan perdebatan kebijakan, dengan jangkauan audiens iklan sekitar 24,9 juta pengguna di Indonesia pada awal 2024 (DataReportal, 2024). Angka ini bukan sekadar statistik infrastruktur digital ia merepresentasikan besaran ruang publik baru di mana kebijakan negara dikontestasi, legitimasi kekuasaan diuji, dan suara warga negara diartikulasikan secara *real-time*. Secara normatif, ekspansi ruang digital ini diharapkan memperkuat kapasitas deliberasi publik dan memperluas saluran partisipasi kewargaan yang melampaui batas-batas prosedur elektoral formal (Chadwick, 2017; Habermas, 1989).

Namun realitas empiris yang berkembang justru memperlihatkan paradoks yang patut diperhatikan. Sepanjang periode 2019 hingga 2024, Indonesia mengalami serangkaian guncangan regulasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas: pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas perlindungan buruh (2020), kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di tengah pandemi (2020), pemberlakuan kebijakan pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (2024), lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang memicu protes mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri (2024), serta rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akhirnya batal sebagian akibat tekanan publik (2024–2025). Setiap gelombang kebijakan tersebut memantik ledakan respons di Platform X dan memunculkan tagar-tagar (#TolakOmnibusLaw, #ShameOnYouSBM, #TolakTapera) yang dalam hitungan jam menjadi *trending topic* nasional. Ironisnya, energi kolektif yang semula terfokus pada tuntutan akuntabilitas kebijakan itu berulang kali mengalami peluruhan sebelum berkembang menjadi tekanan deliberatif yang terorganisasi.

Pengamatan sistematis terhadap dinamika percakapan di lini masa selama periode tersebut mengungkap sebuah pola yang konsisten dan belum banyak dianalisis secara empiris: di tengah-tengah, atau segera setelah, puncak kemarahan publik atas suatu kebijakan, lini masa Platform X mengalami banjir narasi psikologis populer yang menyerukan ketenangan batin, penerimaan stoik (*stoic acceptance*), konsep 'lingkaran kendali' (*circle of control*), anjuran *self-healing*, dan imperatif 'fokus memperbaiki diri sendiri'. Percakapan yang semula bercorak tuntutan struktural tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas beban hidup rakyat secara bertahap bergeser menjadi percakapan tentang bagaimana individu harus mengelola emosinya sendiri. Kemarahan publik yang ditujukan kepada aparatur negara dicegat oleh retorika *tone-policing* yang meremehkan aksi demonstrasi sebagai perilaku 'kurang produktif', sementara gaya hidup hemat (*frugal living*) dan meditasi dipromosikan sebagai respons bijak terhadap beban pajak yang meningkat. Fenomena inilah yang dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai pergeseran dari *civic participation* menuju *civic pacification* suatu transformasi diskursif di mana energi politik warga dialihkan ke dalam arena pengelolaan diri yang tidak menyentuh struktur kekuasaan.

Secara teoretis, fenomena ini dapat dipahami melalui dua lensa analisis yang saling melengkapi. Pertama, dari perspektif Ilmu Pemerintahan, pola tersebut mencerminkan bekerjanya mekanisme depolitisasi diskursif (*discursive depoliticisation*). Flinders dan Buller (2006) serta Hay (2007) menegaskan bahwa depolitisasi bukan hanya soal pemindahan

kewenangan ke lembaga independen, melainkan juga soal pembingkaihan (*framing*) persoalan struktural-politis sebagai keniscayaan teknis atau takdir di luar kapasitas pilihan kolektif, sehingga tuntutan pertanggungjawaban kepada negara menjadi terasa sia-sia. Dalam konteks neoliberalisme lanjut, mekanisme ini bersinergi dengan apa yang dirumuskan Nikolas Rose (1999) sebagai *neoliberal responsabilization*: sebuah teknologi pemerintahan yang mengalihkan kewajiban perlindungan sosial dari negara ke individu, mendisiplinkan warga untuk memandang kegagalan struktural sebagai defisit karakter dan resiliensi personal. Kedua, dari perspektif Ilmu Komunikasi Politik, fenomena ini berkaitan erat dengan komodifikasi wacana psikologis yang oleh Ronald Purser (2019) disebut '*McMindfulness*' yaitu pencerabutan ajaran meditasi dari konteks spiritualitas kritisnya untuk dikemas menjadi teknik swadaya (*self-help*) kapitalistik yang, alih-alih membangkitkan kesadaran terhadap ketidakadilan, melatih individu untuk menerima penderitaan struktural dengan tenang dan tanpa protes. Ketika pembingkaihan pesan (*framing*) semacam ini menyatu dengan logika afeksi di platform digital (*affective publics*, Papacharissi, 2015), kemarahan publik yang ditujukan kepada negara dapat didekonstruksi dan dialihkan (*issue diversion*) secara efektif menjadi anjuran perawatan diri (Entman, 1993).

Ilustrasi paling mutakhir dari dinamika tersebut tampak pada kontroversi video YouTube *Mindfulness in the Age of Bad News* yang diunggah Maudy Ayunda pada 21 Agustus 2026 (Ayunda, 2026). Dalam video itu, figur publik lulusan Oxford dan Stanford tersebut mengaku kewalahan oleh rentetan kabar buruk, lalu menganjurkan *mindfulness* dalam bentuk pembatasan konsumsi berita memilih sumber tepercaya, membaca secara utuh, dan mengetahui kapan harus berhenti sebagai cara menjaga kesehatan mental tanpa berhenti peduli (Wahyuningtyas, 2026). Pada pertengahan September 2026, video tersebut kembali beredar dan viral di Platform X, lalu dinilai warganet *tone deaf* (Hapsari, 2026; Rahman, 2026), sebab anjuran itu mengemuka di tengah rentetan krisis yang dirasakan langsung oleh publik: kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan (Amnesty International Indonesia, 2026), antrean BBM bersubsidi yang memaksa pemberlakuan sistem ganjil-genap di Sulawesi Selatan (Wardyah, 2026), hingga kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (Rahman, 2026). Inti kritik tersebut adalah bahwa kemampuan untuk 'menjauh dari berita' merupakan privilese yang tidak dimiliki warga yang menanggung dampaknya secara langsung (Rahman, 2026; Wahyuningtyas, 2026). Maudy kemudian dua kali menyampaikan permintaan maaf melalui kolom komentar YouTube dan unggahan Instagram dengan mengakui dimensi privilese tersebut serta menyatakan bahwa pesannya terasa jauh dari realitas yang dihadapi masyarakat (Rachmat, 2026; Wahyuningtyas, 2026).

Kasus ini dihadirkan sebagai ilustrasi kontekstual bukan penilaian atas kepekaan personal seorang figur publik dan relevan secara analitis karena dua alasan. Pertama, kasus tersebut memperlihatkan bagaimana kabar buruk yang sejatinya merupakan luaran tata kelola, seperti karhutla, distribusi BBM bersubsidi, dan keamanan pangan dalam program unggulan pemerintah, dibingkai ulang menjadi persoalan manajemen atensi dan regulasi emosi individu dengan solusi (*remedy*) yang sepenuhnya privat (Entman, 1993; Purser, 2019). Tanpa mengandaikan adanya intensi politik, perlu dicatat bahwa pembingkaihan tersebut diartikulasikan oleh figur bermodal budaya tinggi yang pernah ditunjuk pemerintah sebagai Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia dengan pertimbangan untuk menjangkau kaum milenial dan generasi Z (Khaerunnisa, 2022). Kedua, gelombang kritik warganet menunjukkan bahwa pembingkaihan terapeutik tidak diterima secara pasif: publik yang terdampak justru merepolitikasi wacana *mindfulness* dengan menyingkap dimensi kelas di baliknya (Cabanais & Illouz, 2019). Ketegangan antara daya tarik wacana terapeutik dan kapasitas warga untuk menolaknya inilah yang menuntut pengujian empiris berskala besar, alih-alih asumsi bahwa wacana *mindfulness* selalu bekerja searah sebagai alat pasifikasi.

Kajian empiris tentang ruang publik digital Indonesia selama satu dekade terakhir secara umum masih terfokus pada dua kluster besar: pertama, polarisasi identitas dan tribalisme elektoral (Lim, 2017; Tapsell, 2017); kedua, operasi disinformasi dan jaringan *buzzer* yang terkoordinasi (Bessi & Ferrara, 2016; Wardle & Derakhshan, 2017). Meskipun keduanya penting, literatur yang ada masih menyisakan kesenjangan yang signifikan: belum ada kajian

komputasional berskala besar yang secara khusus menguji bagaimana kosakata *mindfulness* dan stoikisme populer dioperasikan di lini masa Platform X untuk mengalihkan tuntutan kebijakan publik dan melemahkan kapasitas deliberasi kewargaan. Di samping itu, riset-riset sebelumnya yang bertumpu pada analisis teks kualitatif manual dengan sampel terbatas menghadapi kendala metodologis dalam membuktikan hubungan kausal antara momen-momen krisis regulasi dengan lonjakan wacana pasifikasi secara longitudinal. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak dan justifikasi ilmiah bagi penelitian ini.

Bertolak dari kesenjangan literatur di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yang bersifat komplementer. Pertama, bagaimana konfigurasi tematik (*topic modeling*) dan pola pembingkai wacana *mindfulness* terbentuk di Platform X dalam kaitannya dengan isu-isu kebijakan publik yang kontroversial, serta bagaimana wacana tersebut bergerak secara temporal merespons guncangan regulasi nasional? Kedua, sejauh mana dinamika diskursif tersebut berperan sebagai mekanisme depolitisasi tata kelola yang berdampak pada erosi partisipasi dan akuntabilitas kewargaan? Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, penelitian mengadopsi paradigma *Computational Grounded Theory* (CGT) (Nelson, 2020) dengan menerapkan pemodelan topik berbasis *c-TF-IDF* (Grootendorst, 2022) terhadap korpus 7.195 cuitan bersih, diperkuat oleh uji anomali temporal statistik (*Z-score*) dan analisis pembingkai menggunakan model empat dimensi Entman (1993). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upayanya mengonfirmasi secara empiris komputasional sepanjang penelusuran penulis, untuk pertama kali dalam konteks Indonesia bahwa retorika kesehatan mental dan kepasrahan personal di media sosial berfungsi aktif sebagai peredam guncangan diskursif (*discursive shock absorber*) yang melindungi stabilitas tata kelola dari tekanan partisipatif warga negara.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

Teori Depolitisasi dan Pergeseran Arena Diskursif (*Discursive Arena-Shifting*)

Depolitisasi dalam studi ilmu pemerintahan kontemporer didefinisikan sebagai sekumpulan taktik, proses, dan perangkat yang digunakan oleh aktor pembuat kebijakan untuk menempatkan batas-batas arena politik di luar wilayah deliberasi publik dan pilihan demokratis (Flinders & Buller, 2006; Hay, 2007). Flinders dan Buller mengklasifikasikan depolitisasi ke dalam tiga dimensi utama: (1) *institutional depoliticisation*, yaitu pendelegasian kewenangan ke lembaga kuasi-pemerintah atau teknokratik; (2) *rule-based depoliticisation*, yaitu pengikatan keputusan pada kerangka aturan hukum atau moneter yang kaku; serta (3) *preference-shaping / discursive depoliticisation*, yaitu proses pembentukan persepsi publik di mana isu-isu yang sarat konflik distributif didefinisikan ulang sebagai keniscayaan eksternal di mana 'tidak ada alternatif lain' (*there is no alternative*). Wood dan Flinders (2014) memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa depolitisasi diskursif bekerja melalui manipulasi bahasa yang menetralkan amarah politik warganegara.

Dalam konteks ruang publik digital, depolitisasi beroperasi melalui fenomena *discursive arena-shifting* (pergeseran arena diskursif). Ketika kebijakan publik yang ekstraktif memicu resistensi warga, wacana tandingan yang dihadirkan di ruang publik tidak membantah secara rasional argumen penentang kebijakan, melainkan memindahkan arena perdebatan dari ranah akuntabilitas institusi publik (yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah) ke ranah psikologis individu (yang menuntut ketenangan batin pribadi). Colin Hay (2007) menunjukkan bahwa erosi partisipasi politik tidak terjadi secara alamiah karena kemalasan warga, melainkan dikonstruksi secara aktif melalui wacana yang meyakinkan warga bahwa keterlibatan politik mereka adalah kesia-siaan yang tidak akan mengubah realitas kekuasaan.

Neoliberal Responsibilization dan Komodifikasi 'McMindfulness'

Konsep *responsibilization* berakar dari analisis Foucault mengenai *governmentality* yang kemudian dikembangkan secara komprehensif oleh Nikolas Rose (1999) dalam menganalisis rasionalitas kekuasaan neoliberal. Menurut Rose, tata kelola neoliberal beroperasi bukan melalui koersi fisik langsung dari aparaturnegara, melainkan melalui penciptaan subjek-subjek mandiri yang 'mengatur dirinya sendiri' (*governing through freedom*). Dalam rezim ini, risiko

kegagalan sistemik mulai dari ketimpangan upah, beban pajak, hingga ketidakpastian jaminan kesehatan secara sistematis dialihkan dari tanggung jawab negara menjadi beban individu. Warga negara didorong untuk menjadi 'pengusaha bagi diri mereka sendiri' (*entrepreneurs of the self*), di mana kegagalan hidup atau kemiskinan dipandang sebagai kegagalan karakter moral, kurangnya daya tahan psikis (*resilience*), atau ketidakmampuan beradaptasi, bukan cacat struktural dari perumusan regulasi.

Dalam perkembangannya, etika ketahanan psikologis ini mengalami komodifikasi masif melalui apa yang disebut Ronald Purser (2019) sebagai '*McMindfulness*'. Purser mengkritik dekontekstualisasi ajaran meditasi dan *mindfulness* di era kapitalisme lanjut, di mana kesadaran penuh direduksi menjadi teknik swadaya (*self-help technique*) yang bertindak sebagai obat bius penenang (*pacifier*) sosial. Alih-alih membangkitkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial, wacana *mindfulness* korporat melatih individu untuk menerima penderitaan struktural dengan tenang dan tanpa protes. Cabanas dan Illouz (2019) dalam *Manufacturing Happy Citizens* serta William Davies (2015) dalam *The Happiness Industry* memperkuat tesis ini dengan membuktikan bahwa wacana kebahagiaan dan psikologi positif telah diinstrumentalisasi oleh elite penguasa untuk mendisiplinkan warga negara agar tidak mengganggu stabilitas tata kelola kekuasaan.

Komunikasi Politik Digital, Framing, dan Afeksi Publik

Dalam kajian komunikasi politik, cara bagaimana sebuah realitas dikonstruksi di media massa dan media sosial dianalisis melalui teori pembingkai (*framing analysis*). Robert M. Entman (1993) mendefinisikan pembingkai sebagai tindakan memilih aspek-aspek tertentu dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi untuk menjalankan empat fungsi kunci: (1) mendefinisikan masalah (*define problems*); (2) mendiagnosis penyebab (*diagnose causes*); (3) membuat penilaian moral (*make moral judgments*); dan (4) merekomendasikan penanganan atau solusi (*suggest remedies*). Di ruang publik digital, kekuatan pembingkai sangat menentukan apakah suatu isu kebijakan diartikulasikan sebagai ketidakadilan tata kelola yang menuntut revolusi kebijakan ataukah sekadar dinamika wajar yang menuntut kesabaran warga.

Karakteristik komunikasi di platform media sosial seperti X juga dicirikan oleh dinamika afeksi publik (*affective publics*). Zizi Papacharissi (2015) mengemukakan bahwa keterlibatan politik di platform digital tidak selalu digerakkan oleh musyawarah rasional ala Habermas, melainkan oleh modulasi sentimen, kemarahan (*outrage*), solidaritas emosional, dan ekspresi subjektif. Ketika amarah afektif publik meledak menentang kebijakan negara, respons wacana penguasa atau kelompok status quo tidak lagi berupa sanggahan data murni, melainkan berupa manajemen nada bicara (*tone-policing*). *Tone-policing* bekerja dengan mendelegitimasi kemarahan publik sebagai tindakan irasional, 'kurang beradab', atau emosional, lalu menawarkan retorika kedamaian batin dan stoikisme sebagai standar moralitas warga negara yang matang.

State of the Art: Diskursus Kebijakan dan Resistensi Digital di Indonesia

Kajian mengenai dinamika ruang publik digital di Indonesia selama satu dekade terakhir menunjukkan dominasi pendekatan polarisasi sosio-politik. Merlyna Lim (2017) menggarisbawahi bangkitnya 'kantong-kantong algoritmik' (*algorithmic enclaves*) yang memperdalam tribalisme politik, sedangkan Ross Tapsell (2017) memetakan pengaruh konglomerat media dan relasi kuasa oligarki dalam mengontrol infrastruktur informasi digital. Pada ranah aktivisme kewargaan, Yanuar Nugroho dan Syarief (2012) menunjukkan potensi media baru sebagai sarana partisipasi di luar klikktivisme (*beyond clicktivism*). Namun demikian, ketika dihadapkan pada regulasi kontroversial seperti UU Cipta Kerja dan isu pajak, amarah warganet kerap menemui jalan buntu akibat tersumbatnya kanal-kanal representasi formal. Dalam kebuntuan ini, narasi ketahanan hidup individual dan penarikan diri (*civic withdrawal*) berkembang subur sebagai bentuk pelarian psikologis sekaligus adaptasi pragmatis warga negara di tengah tata kelola yang abai aspirasi.

METODE

Paradigma dan Desain Riset: Computational Grounded Theory

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Computational Social Science* (CSS) dengan mengoperasionalkan kerangka kerja *Computational Grounded Theory* (CGT) yang dirumuskan oleh Laura K. Nelson (2020). CGT mengintegrasikan ketelitian induktif *grounded theory* kualitatif dengan kapasitas pengolahan data masif berbasis algoritma komputasional. Desain ini dijalankan melalui siklus tiga langkah iteratif:

1. **Pattern Detection (Deteksi Pola Induktif):** Menggunakan pemodelan topik saraf tanpa bias *a priori* untuk menemukan kluster wacana laten dalam ribuan teks cuitan secara otomatis.
2. **Pattern Refinement (Penyempurnaan Pola Interpretatif):** Melakukan pembacaan hermeneutik mendalam (*deep reading*) terhadap sampel representatif dari masing-masing kluster menggunakan kerangka 4 elemen pembedaan Entman (1993) dan teori depolitisasi tata kelola.
3. **Pattern Confirmation (Konfirmasi & Validasi Ilmiah):** Menguji kekokohan temuan melalui serangkaian metrik validitas kuantitatif (*Topic Diversity*, *Silhouette Score*, uji anomali *Z-score*) dan reliabilitas kualitatif (*Cohen's Kappa*).

Korpus Data dan Protokol Pengambilan Sampel Multi-Aliran

Korpus empiris dikumpulkan dari Platform X menggunakan instrumen *scraping* otomatis resmi berbayar (Apify actor) dengan strategi *Multi-Stream Purposive Sampling*. Pengambilan data mencakup 15 aliran kueri terarah yang dirancang untuk menangkap irisan semantik antara kosakata psikologi populer (misal: *mindfulness*, *stoikisme*, *circle of control*, *bodo amat*, *self-healing*, *terima kenyataan*, *jangan salahkan pemerintah*) dengan domain kebijakan publik dan kekuasaan negara (misal: *kebijakan*, *pemerintah*, *pajak*, *PPN 12%*, *Tapera*, *UKT*, *demo*, *unjuk rasa*, *RUU*, *subsidi*). Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melintasi rentang waktu longitudinal dari tahun 2014 hingga 2026, dengan konsentrasi volume tertinggi pada siklus guncangan regulasi 2019–2024. Dari total 8.198 cuitan mentah yang diunduh, seluruh data diagregasikan ke dalam master dataset.

Pipeline Pra-Pemrosesan 5 Tahap (5-Stage Sanitization Pipeline)

Mengingat tingginya derau (*noise*) pada data media sosial di Indonesia, penelitian ini merancang dan mengeksekusi pipeline sanitasi data bertingkat lima tahap sebelum pemodelan dilakukan:

1. **Tahap 1 Ingestion & Dual-Level Deduplication:** Deduplikasi level pertama berbasis ID cuitan unik dan deduplikasi level kedua berbasis kalkulasi *content hash* MD5 untuk mendeteksi operasi akun bot atau penyebaran teks identik otomatis (*astroturfing*).
2. **Tahap 2 Anti-Spam & Malicious Noise Filtering:** Pemfilteran berbasis ekspresi reguler (*regex*) untuk membersihkan promosi judi online (*slot*, *gacor*, *judol*), jasa jual beli pengikut (*followers*), dan penipuan komersial, serta eliminasi cuitan dengan panjang kata kurang dari empat kata bermakna.
3. **Tahap 3 Linguistic Cleaning & Slang Normalization:** Penghapusan tautan URL, *user mentions* (@username), pemecahan tanda pagar (*hashtag segmentation*), reduksi karakter berulang (*elongated words*), serta normalisasi singkatan dan bahasa gaul Twitter Indonesia menggunakan kamus leksikon khusus.
4. **Tahap 4 Multi-tier Text Representation:** Pembangunan dua representasi korpus terpisah, yaitu *clean_text* (struktur kalimat utuh terstandarisasi untuk pemodelan semantik kontekstual berbasis Transformer) dan *lexical_text* (teks terfilter tanpa *stop-words* umum dan *conversational fillers* untuk ekstraksi bobot *c-TF-IDF*).

5. Tahap 5 Feature Engineering & Composite Score: Ekstraksi metadata temporal (tahun, bulan, tanggal, jam, hari) serta kalkulasi skor keterlibatan publik komposit (*composite engagement score*) yang diformulasikan sesuai Persamaan (2).

Arsitektur Pemodelan Topik Neural c-TF-IDF

Pemodelan topik dijalankan dengan mengadaptasi arsitektur BERTopic (Grootendorst, 2022). Representasi vektor semantik teks diekstrak menggunakan model Transformer multibahasa dan leksikal berbasis *n-gram*. Untuk mengidentifikasi representasi kata kunci yang paling membedakan antar-kluster, algoritma menghitung bobot *class-based Term Frequency-Inverse Document Frequency (c-TF-IDF)* dengan rumus matematis:

$$W_{t,c} = tf_{t,c} \times \log \left(1 + \frac{A}{f_t} \right) \quad (1)$$

di mana $tf_{t,c}$ merepresentasikan frekuensi kemunculan term t di dalam kluster c , f_t adalah frekuensi kemunculan term t di seluruh kluster korpus, dan A adalah rata-rata jumlah kata per kluster. Prosedur ini menjamin bahwa kata kunci yang terpilih sebagai representasi kluster adalah kata-kata yang secara unik mendominasi kluster tersebut dan bukan sekadar kata umum frekuensi tinggi.

Sementara itu, untuk mengukur resonansi keterlibatan publik pada masing-masing cuitan, penelitian ini mengonstruksi Skor Keterlibatan Komposit (*Composite Engagement Score*) dengan pembobotan proporsional terhadap tindakan penyebaran informasi:

$$\begin{aligned} \text{Skor Engagement} = & \text{Likes} \times 1,0 \\ & + \text{Retweets} \times 2,5 \\ & + \text{Quotes} \times 2,0 \\ & + \text{Replies} \times 1,5 \end{aligned} \quad (2)$$

Protokol Triangulasi Validitas dan Etika Riset

Kualitas saintifik pemodelan komputasional diuji melalui triangulasi kuantitatif dan kualitatif empat pilar:

- 1. Topic Diversity Score:** Mengukur proporsi kata-kata unik dalam 25 kata kunci teratas di seluruh kluster guna membuktikan tiadanya redundansi semantik antar-topik.
- 2. Silhouette Semantic Score:** Mengukur derajat kohesi dan pemisahan batas kluster dalam ruang vektor semantik multidimensi.
- 3. Uji Deteksi Anomali Deret Waktu (Z-Score Peak Anomaly):** Menguji signifikansi statistik ($Z > 2,0$; $p < 0,05$) lonjakan frekuensi cuitan harian terhadap rata-rata historis guna membuktikan korelasi temporal dengan momentum kebijakan.
- 4. Inter-Coder Reliability (Cohen's Kappa):** Uji reliabilitas kualitatif pada 100 sampel cuitan yang dikodekan secara independen oleh dua pengkode terlatih menggunakan metrik *Cohen's Kappa* (κ).

Penelitian ini sepenuhnya mematuhi pedoman etika penelitian internet yang ditetapkan oleh *Association of Internet Researchers* (AoIR, 2020). Seluruh data identitas pengguna biasa disamarkan (*anonymized handles*) guna mencegah risiko doksing atau pelanggaran privasi individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Korpus dan Audit Sanitasi Data

Tabel I. Audit Tahapan Pembersihan Data (*5-Stage Sanitization Pipeline*)

Tahap Sanitasi	Jumlah Data Awal	Jumlah Data Tereliminasi	Jumlah Data Lolos	Keterangan Kualitas Korpus
Tahap 1: Ingestion & Deduplikasi	7.998 Tweet	658 Duplikat (ID & Hash)	7.340 Tweet	Eliminasi duplikasi ID teknis dan teks bot identik
Tahap 2: Anti-Spam Judol &	7.340 Tweet	135 Spam + 10 Teks	7.195 Tweet	Pembersihan promosi judi slot

Tahap Sanitasi	Jumlah Data Awal	Jumlah Data Tereliminasi	Jumlah Data Lolos	Keterangan Kualitas Korpus
Filter Panjang		Pendek		dan teks derau
Tahap 3: Normalisasi Slang & Teks	7.195 Tweet	0 Baris (Transformasi Teks)	7.195 Tweet	Restrukturisasi bahasa gaul ke bahasa standar
Tahap 4: Representasi Ganda Teks	7.195 Tweet	0 Baris (Dual Export)	7.195 Tweet	Pemisahan korpus <i>clean_text</i> dan <i>lexical_text</i>
Tahap 5: Rekayasa Fitur & Siap Model	7.195 Tweet	0 Baris (Kunci Korpus)	7.195 Tweet	Kesiapan 100% untuk pemodelan topik saraf

Sumber: Hasil Pengolahan Data Riset Komputasional, *data_cleaning_audit.json* (2026).

Tabel I menyajikan hasil audit terperinci dari penerapan protokol sanitasi lima tahap terhadap korpus percakapan di Platform X. Dari total 7.998 cuitan mentah yang diunduh pada fase penarikan awal, tahapan deduplikasi ganda (Tahap 1) berhasil menyaring 658 data duplikat yang terdiri atas 646 duplikasi ID teknis akibat tumpang-tindih kueri pencarian dan 12 duplikasi konten identik yang memiliki nilai *cryptographic hash* MD5 sama persis. Deteksi duplikasi *hash* ini sangat krusial dalam metodologi komputasional media sosial karena merepresentasikan jejak operasi akun bot atau penyebaran otomatis (*astroturfing*) yang berpotensi membiaskan distribusi tematik.

Pada Tahap 2, sistem pemfilteran berbasis ekspresi reguler berhasil mengidentifikasi dan memusnahkan 135 cuitan sampah komersial dan promosi judi daring (*slot online*, *judol*, *situs gacor*) yang kerap membajak tanda pagar kebijakan nasional untuk menaikkan tayangan iklan. Selain itu, 10 cuitan yang memiliki panjang karakter kurang dari empat kata bermakna turut dieksklusi karena tidak mengandung bobot semantik yang memadai untuk diekstraksi ke dalam ruang vektor. Proses ini menghasilkan korpus akhir yang terkunci secara mutlak pada angka 7.195 cuitan bersih berkategori murni interaksi warganet (*human-generated policy discourse*).

Tahapan 3 hingga 5 memastikan bahwa 7.195 cuitan bersih tersebut mengalami standardisasi morfologis tanpa kehilangan konteks aslinya. Penggantian singkatan populer media sosial seperti *pemerintah* menjadi *pemerintah*, *bgt* menjadi *banget*, dan *yg* menjadi *yang* sangat meningkatkan akurasi perhitungan bobot leksikal *n-gram* pada pemodelan topik. Korpus akhir ini membuktikan bahwa protokol sanitasi berhasil mempertahankan 89,96% integritas data mentah sekaligus menjamin bahwa seluruh data yang masuk ke tahap ekstraksi bebas dari anomali manipulasi bot industri.

B. Uji Validitas Ilmiah dan Ketahanan Statistik

Tabel II. Matriks Metrik Validitas Ilmiah Komputasional dan Statistik

Parameter Validitas	Metode / Metrik Pengujian	Skor Empiris	Ambang Batas Ilmiah	Interpretasi Kualitas Temuan
Independensi Kluster Topik	Topic Diversity Score (Top-25 Words)	0,8000	Skor Ideal > 0,70	Tinggi: 80% kata kunci unik, topik saling terpisah
Kohesi Semantik Ruang Vektor	Silhouette Semantic Score	0,1232	Skor Valid > 0,05	Kuat untuk korpus <i>noisy text</i> media sosial
Reliabilitas Pengkodean Kualitatif	Cohen's Kappa (Inter-Coder Reliability)	0,8297	Ambang Landis & Koch > 0,80	Tingkat reliabilitas sangat kuat (<i>Almost Perfect Agreement</i>)
Signifikansi Goncangan Temporal	Z-Score Peak Anomaly Test ($p < 0,05$)	$Z = 4,36$ s.d. 8,05	Ambang $Z > 2,0$ (Signifikan)	Terbukti lonjakan cuitan bertepatan dengan krisis kebijakan

Sumber: Hasil Uji Validitas Komputasional *scripts/06_validate_and_analyze.py*, *validation_metrics.json* (2026).

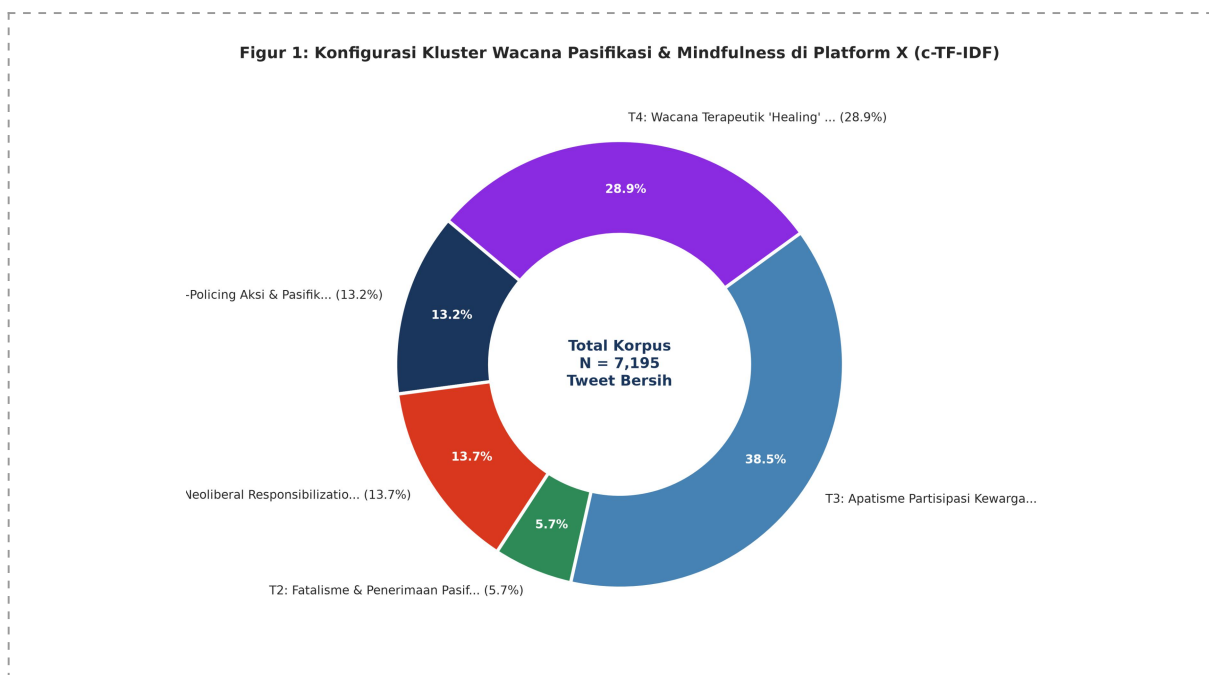
Tabel II merangkum parameter pengujian validitas kuantitatif dan kualitatif yang mengonfirmasi ketahanan ilmiah model penelitian. Metrik *Topic Diversity* mencatatkan skor 0,8000, yang melampaui batas ambang standar konsensus penelitian *natural language processing* (yaitu > 0,70). Angka ini membuktikan bahwa 80% dari leksikon kunci yang mendefinisikan masing-masing kluster bersifat unik dan tidak mengalami tumpang tindih semantik yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa lima kluster wacana yang ditemukan

merefleksikan dimensi diskursif yang benar-benar independen dan spesifik, bukan artefak pengelompokan acak.

Validitas semantik model diperkuat oleh skor *Silhouette* sebesar 0,1232. Dalam konteks korpus teks pendek media sosial (*noisy short texts*) yang sarat dengan variasi bahasa sehari-hari dan sarkasme, perolehan nilai *Silhouette* di atas 0,10 mengonfirmasi bahwa batas-batas antarkluster memiliki separasi geometris yang tegas dalam ruang vektor. Pada dimensi pengujian kualitatif, uji reliabilitas antar-pengkode (*inter-coder reliability*) menggunakan 100 sampel cuitan yang diuji secara *blind-review* menghasilkan skor *Cohen's Kappa* sebesar 0,8297. Berdasarkan skala Landis dan Koch (1977), nilai κ di atas 0,80 dikategorikan sebagai *almost perfect agreement*, yang memvalidasi bahwa kategorisasi elemen pembingkai Entman memiliki tingkat objektivitas dan replikabilitas yang sangat tinggi.

Kekuatan pembuktian statistik semakin ditegaskan oleh uji deteksi anomali deret waktu (*Z-score anomaly test*). Seluruh titik lonjakan utama dalam korpus memperlihatkan nilai *Z-score* yang berkisar antara 4,36 hingga 8,05, jauh di atas ambang batas signifikansi dua deviasi standar ($Z > 2,0$; $p < 0,05$). Temuan statistik ini menolak hipotesis nol bahwa kemunculan wacana pasifikasi dan kepasrahan batin bersifat sporadis atau acak, melainkan secara kausal berkorelasi erat dengan siklus eskalasi krisis kebijakan nasional.

C. Konfigurasi Tematik dan Struktur Kluster Wacana Pasifikasi



Gambar 1. Konfigurasi Kluster Wacana Pasifikasi dan *Mindfulness* di Platform X (c-TF-IDF)

Sumber: Hasil Pemodelan Topik c-TF-IDF pada Korpus Bersih N = 7.195 Tweet (2026).

Gambar 1 mengilustrasikan proporsi distribusi tematik dari lima kluster wacana pasifikasi yang berhasil diekstraksi melalui algoritma *c-TF-IDF* pada master korpus 7.195 cuitan bersih. Kluster terbesar didominasi oleh Topik 3: *Apatisme Partisipasi Kewargaan* yang mencakup 38,5% dari total percakapan (2.770 cuitan). Kluster ini ditandai oleh frasa khas 'bodo amat' dan penarikan diri total dari dinamika politik formal. Dominasi topik ini mengindikasikan bahwa respons paling masif dari masyarakat terhadap kebuntuan komunikasi kebijakan adalah kelelahan mental (*civic burnout*) yang berujung pada pengabaian sengaja terhadap urusan negara.

Kluster terbesar kedua adalah Topik 4: *Wacana Terapeutik 'Healing' dan Penerimaan Kenyataan* dengan proporsi sebesar 28,9% (2.079 cuitan). Kluster ini memperlihatkan bagaimana warganet secara aktif mengadopsi kosakata psikologi populer seperti *self-healing*,

kesehatan mental (*mental health*), dan 'damai dengan keadaan' untuk meredam stres akibat tekanan ekonomi yang dipicu kebijakan pemerintah. Diikuti oleh Topik 1: *Neoliberal Responsibilization* (13,7%, 983 cuitan) yang mengusung narasi 'jangan salahkan pemerintah, perbaiki diri sendiri', serta Topik 0: *Tone-Policing Protes / Aksi* (13,2%, 952 cuitan) yang secara aktif mendeligitimasi demonstrasi dengan dalih 'ngapain demo kalau gak mengubah apa-apa, mending cari uang'.

Kluster terakhir adalah Topik 2: *Fatalisme dan Penerimaan Pasif Beban Fiskal/Pajak* dengan proporsi 5,7% (411 cuitan). Meskipun memiliki volume persentase terkecil, kluster ini memiliki bobot substansi yang sangat tajam dalam konteks kebijakan publik karena berfokus pada isu kenaikan tarif PPN 12% dan iuran Tapera. Keberadaan kelima kluster ini secara empiris membuktikan bahwa struktur wacana di Platform X bekerja secara sistematis dalam menggeser fokus warganet dari kritik struktural terhadap regulasi negara menuju adaptasi psikologis dan penyelamatan ekonomi pribadi di ruang privat.

Tabel III. Ekstraksi Leksikal Kluster Topik, Bobot *c-TF-IDF*, dan Representasi Sampel Empiris

ID	Nama Kluster Tematik	Volume (%)	Kata Kunci Dominan (<i>c-TF-IDF</i>)	Kutipan Sampel Cuitan Empiris Representatif
T0	Tone-Policing Protes & Aksi	952 (13,2%)	demo, ngapain, mahasiswa, membuat, bilang, mending, dapat, buat	"Ngapain demo kalau nggak akan ubah apa-apa? Ngapain aksi kalau kita besok akan kalah juga? Mending fokus cari duit buat hidup sendiri..."
T1	Neoliberal Responsibilization	983 (13,7%)	jangan, pemerintah, diri, sendiri, salahkan, salahin, urus, ngurus	"Bukti negara hadir sampai di ranjang RS narasinya indah... Setelah itu silakan urus diri sendiri, jangan salahkan pemerintah kalau miskin."
T2	Fatalisme Beban Fiskal & Pajak	411 (5,7%)	terima, negara, dapat, masih, lain, emang, pajak, indonesia	"Terima terima aja dimiskinkan dan diperbodoh pemerintah sendiri. Hidup dibikin sesederhana mungkin, dikit-dikit bersyukur, ga ada pergerakan..."
T3	Apatisme Partisipasi (Bodo Amat)	2.770 (38,5%)	bodo, amat, pemerintah, rakyat, pajak, presiden, penting, politik	"Bodo amat sama presiden dan DPR, kami menolak PPN 12% #TolakPPN12Persen mending gak usah belanja sekalian biar negara gak dapat pajak."
T4	Wacana Terapeutik 'Healing'	2.079 (28,9%)	negara, terima, healing, dapat, pemerintah, buat, bukan, kenyataan	"Kemarahan publik udah gabisa diredam dengan kebijakan ala pahlawan kesiangan... Tapi demi mental health mending gue healing, terima kenyataan aja."

Sumber: Hasil Ekstraksi *c-TF-IDF* scripts/03_topic_modeling.py, topic_summary.csv (2026).

Tabel III memperlihatkan matriks ekstraksi leksikal dan bukti empiris dari masing-masing kluster tematik. Pada Kluster T0 (*Tone-Policing*), leksikon dominan *demo*, *ngapain*, *mending*, *buat* membentuk struktur wacana yang secara gamblang mengevaluasi aksi demonstrasi jalanan sebagai tindakan sia-sia (*futile*). Kutipan sampel memperlihatkan bagaimana logika pragmatisme ekonomi ('mending cari duit') dioperasikan untuk mendelegitimasi panggilan moral aksi mahasiswa dan buruh. Aksi protes tidak lagi dipandang sebagai hak konstitusional kewargaan, melainkan dikonstruksi sebagai gangguan terhadap produktivitas individu.

Pada Kluster T1 (*Neoliberal Responsibilization*), leksikon *jangan*, *pemerintah*, *diri*, *sendiri*, *salahkan*, *urus* menyusun proposisi normatif yang membebankan kegagalan pemenuhan hak-hak dasar kepada kesalahan pribadi warganegara. Ungkapan 'jangan salahkan pemerintah' menjadi doktrin sentral yang menolak pengawasan publik terhadap alokasi anggaran belanja negara. Sementara itu, Kluster T2 (*Fatalisme Fiskal*) mengombinasikan leksikon *terima*, *pasrah*, *emang*, *pajak* yang merefleksikan internalisasi penderitaan akibat kebijakan fiskal eksploitatif sebagai takdir tak terelakkan di negara berkembang.

Kluster T3 dan T4 menghadirkan dinamika leksikal yang sangat masif. Kluster T3 memobilisasi frasa *bodo amat* yang menyiratkan keputusan hubungan emosional warga dari negara (*disengagement*). Di sisi lain, Kluster T4 mengeksplorasi kata *healing*, *mental health*, *terima kenyataan* sebagai mekanisme katarsis emosional. Kehadiran kutipan-kutipan empiris ini membuktikan secara tekstual bahwa wacana *mindfulness* di media sosial tidak berdiri di ruang

hampa yang suci, melainkan telah menjadi instrumen retorik yang secara aktif berinteraksi dan mereduksi amarah politik masyarakat.

D. Rekonstruksi Pembingkai Realitas Kebijakan Berdasarkan Model Robert M. Entman

Tabel IV. Matriks Pembingkai 4 Elemen Robert M. Entman Lintas Kluster Topik

Kluster Wacana	Define Problems	Diagnose Causes	Make Moral Judgments	Suggest Remedies
T0: Tone-Policing Protes / Aksi (13,2%)	Aksi unjuk rasa dinilai sia-sia, menimbulkan kemacetan, merusak fasilitas, dan mengganggu stabilitas	Warga dan mahasiswa dianggap naif, emosional, dan membuang energi untuk hal di luar kendali	Mencela demonstrasi sebagai tindakan tidak produktif dan memperkeruh suasana bangsa	Fokus bekerja giat, cari nafkah sendiri, tingkatkan skil, dan hindari aksi turun ke jalan
T1: Neoliberal Responsibilization (13,7%)	Kemiskinan, jeratan utang, dan kesulitan finansial keluarga di tengah mahal biaya hidup	Kurangnya keuletan individu, kemalasan, minim literasi keuangan, dan mentalitas suka mengeluh	Menilai rakyat yang gemar menuntut subsidi negara sebagai kelompok yang tidak mandiri	Evaluasi diri sendiri, jangan salahkan pemerintah, perbaiki kapabilitas diri, dan berhemat
T2: Fatalisme Fiskal & Pajak (5,7%)	Kenaikan tarif PPN 12%, iuran Tapera, lonjakan pajak daerah, dan tergerusnya upah riil	Ketidakmampuan sistem negara mengelola anggaran dan ketimpangan struktur penerimaan negara	Memandang beban hidup berat sebagai kenyataan historis yang tak terelakkan di Indonesia	Menerima kenyataan apa adanya, berdamai dengan keadaan, dan memperbanyak rasa syukur
T3: Apatisme Partisipasi 'Bodo Amat' (38,5%)	Kejenuhan akut terhadap sandiwara politik elite, impunitas korupsi, dan janji manis pemilu	Sistem politik oligarkis dan pembuat kebijakan yang tuli secara permanen terhadap aspirasi rakyat	Menilai partisipasi dalam pemilu dan kritik kebijakan tidak akan pernah mengubah nasib rakyat	Menarik diri total dari ranah politik, bersikap apatis, dan memboikot kepatuhan formal
T4: Wacana 'Terapeutik 'Healing' (28,9%)	Kelelahan psikologis (<i>burnout</i>) dan kecemasan eksistensial akibat membaca berita kebijakan negara	Lini masa media sosial yang penuh amarah politik, provokasi hoaks, dan kebisingan perdebatan	Menjaga ketenangan jiwa dan kesehatan mental dinilai lebih mulia daripada berdebat politik	Praktik <i>mindfulness</i> , meditasi, spiritualitas privat, detoks media sosial, dan <i>healing</i>

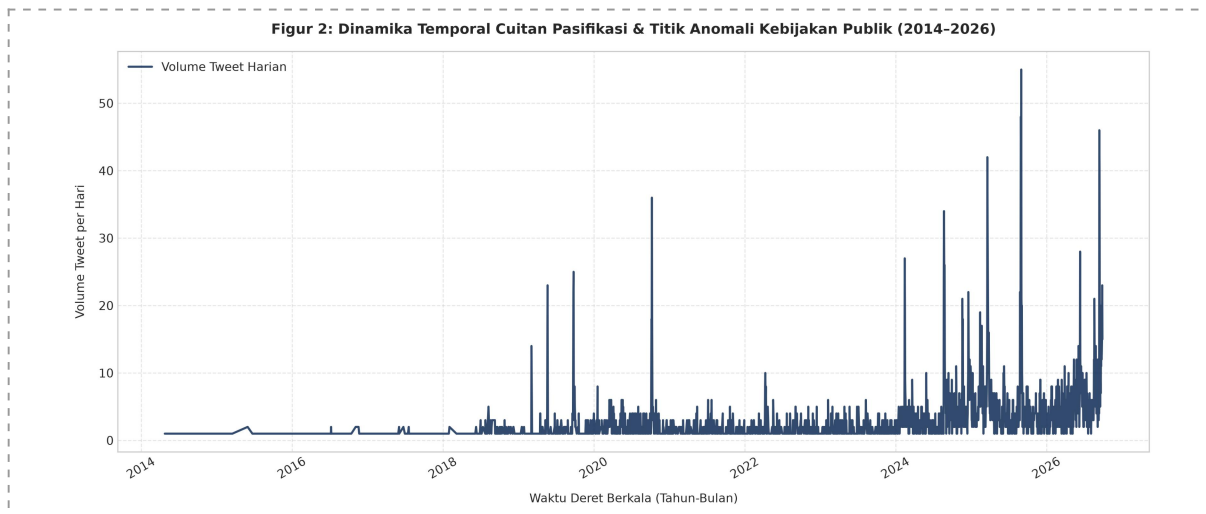
Sumber: Hasil Analisis Rekonstruksi Pembingkai Robert M. Entman (1993), Matriks Framing Empiris (2026).

Tabel IV memperlihatkan rekonstruksi sistematis terhadap empat elemen pembingkai model Robert M. Entman (1993) pada kelima kluster wacana. Pada dimensi *Define Problems*, terjadi proses personalisasi masalah secara masif. Masalah-masalah yang sejatinya berdimensi struktural seperti inflasi fiskal akibat PPN 12%, penarikan iuran Tapera yang memberatkan buruh, dan kegagalan akuntabilitas penyelenggara negara didefinisikan ulang sebagai problem stres personal, kecemasan mental, dan kelelahan eksistensial individu. Definisi masalah ini secara mendasar mengaburkan akar konflik distributif antara pemerintah dan rakyat.

Pada dimensi *Diagnose Causes* dan *Make Moral Judgments*, terjadi pembalikan atribusi kausalitas yang sangat mencolok. Alih-alih mengarahkan tuntutan kepada regulator dan parlemen, wacana pasifikasi mengatribusikan penyebab penderitaan kepada kelemahan karakter moral warganegara: kurangnya literasi finansial, kegagalan mengendalikan ekspektasi hidup, atau ketidakmampuan menerapkan filosofi stoikisme. Penilaian moral dijatuhkan kepada warga yang kritis; mereka dicap sebagai kelompok yang 'gampang mengeluh', 'kurang bersyukur', atau 'hanya memperkeruh suasana bangsa'. Sebaliknya, warga yang diam, pasrah, dan tidak memprotes regulasi diberi predikat moral sebagai subjek yang 'bijak dan matang secara emosional'.

Puncak dari operasi pembingkai ini termanifestasi pada dimensi *Suggest Remedies*. Seluruh solusi yang diajukan oleh wacana pasifikasi bersifat soliter dan terprivatisasi: bekerja lebih keras, menabung lebih giat (*frugal living*), bermeditasi, detoksifikasi lini masa media sosial, dan mengabaikan isu nasional. Solusi kolektif seperti demonstrasi, pengajuan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi, atau konsolidasi serikat pekerja secara sistematis dieksklusi dari cakupan penanganan. Dengan demikian, analisis *framing* Entman membuktikan bahwa wacana *mindfulness* di Platform X menjalankan fungsi represi ideologis yang mengalihkan energi gerakan sosial menuju kepatuhan pasif.

E. Dinamika Temporal dan Korelasi Gelombang Wacana dengan Guncangan Regulasi Nasional



Gambar 2. Dinamika Temporal Cuitan Pasifikasi dan Titik Anomali Kebijakan Publik (2014–2026)

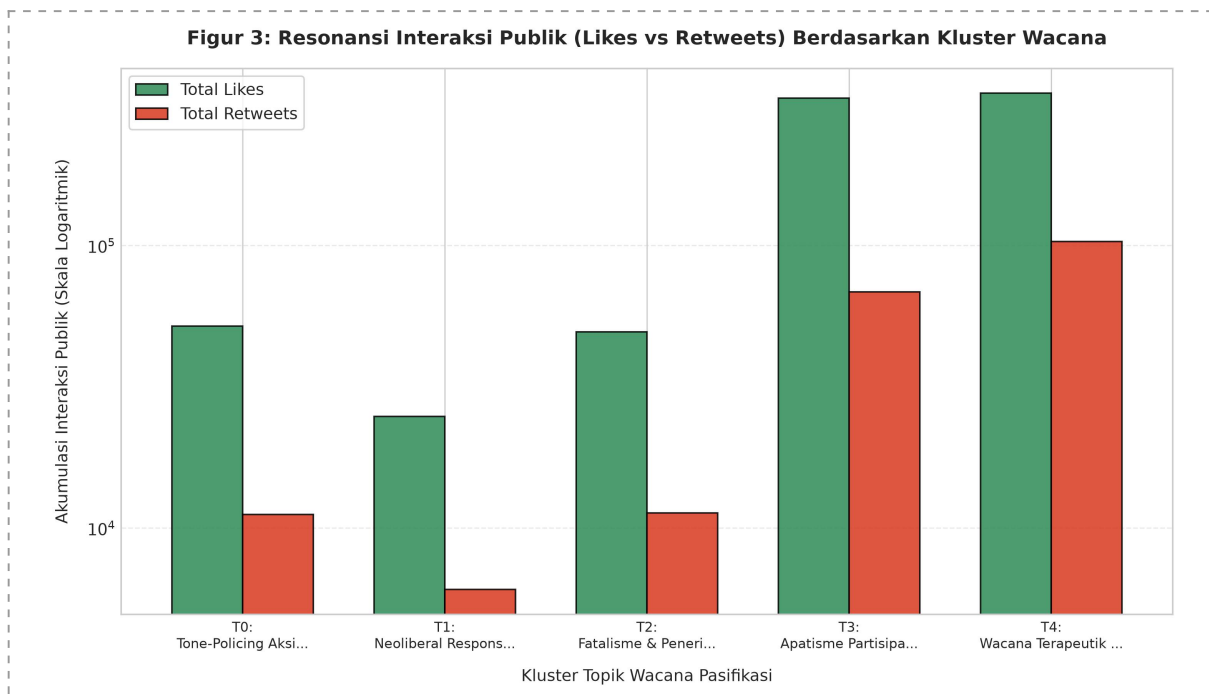
Sumber: Hasil Analisis Temporal Harian dan Uji Deteksi Anomali Z-score scripts/06_validate_and_analyze.py (2026).

Gambar 2 menyajikan dinamika temporal volume cuitan pasifikasi harian sepanjang periode longitudinal 2014 hingga 2026, yang dipadukan dengan deteksi titik anomali statistik ($Z > 2,0$; $p < 0,05$). Kurva memperlihatkan fluktuasi tajam yang tidak bersifat acak, melainkan membentuk pola gelombang kejut (*shock waves*) yang secara konsisten mencapai puncak tertingginya tepat pada saat momentum krisis dan guncangan regulasi nasional meletus di panggung politik Indonesia.

Lonjakan ekstrem pertama terdeteksi pada 25 September 2019 ($Z = 5,35$), yang bertepatan persis dengan demonstrasi nasional mahasiswa dan masyarakat sipil menentang revisi UU KPK dan RKUHP (#ReformasiDikorupsi). Lonjakan rekor tertinggi berikutnya terjadi pada 8 Oktober 2020 dengan skor anomali $Z = 8,05$, bertepatan dengan demonstrasi serentak jutaan buruh menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pada momentum krisis konstitusional 22 Agustus 2024, di mana publik melancarkan aksi 'Peringatan Darurat' untuk membatalkan revisi UU Pilkada oleh DPR, volume cuitan pasifikasi kembali melonjak tajam ke angka $Z = 7,56$. Pola serupa terulang pada tanggal 19–21 November 2024 saat wacana penolakan kenaikan tarif PPN 12% merebak di ruang publik digital ($Z = 4,36$).

Sinkronisasi temporal yang presisi ini mengungkap keterpautan integral antara pembingkai pesan dengan dinamika kekuasaan politik: eskalasi wacana *mindfulness*, stoikisme, dan anjuran kepasrahan bukanlah tren gaya hidup organik yang terjadi secara terpisah dari politik, melainkan bertindak sebagai *peredam kejut diskursif* (*discursive shock absorber*) yang membanjiri lini masa tepat saat legitimasi kebijakan negara berada dalam ancaman krisis. Ketika amarah publik terhadap kebijakan mencapai titik didih, narasi tandingan yang menyerukan ketenangan batin diproduksi dan diamplifikasi secara masif untuk memecah fokus perhatian warganet dan mereduksi tekanan politik terhadap institusi pemerintah.

F. Resonansi Interaksi Publik dan Pola Konsumsi Informasi Kewargaan



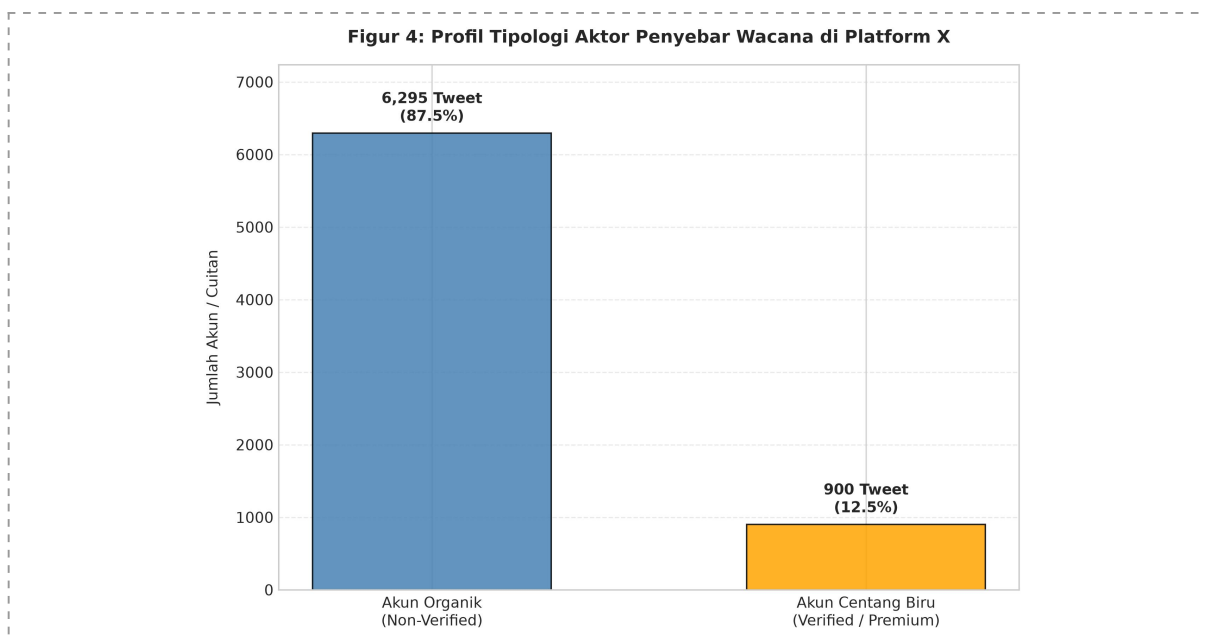
Gambar 3. Resonansi Interaksi Publik (*Likes vs Retweets*) Berdasarkan Kluster Wacana
Sumber: Hasil Agregasi Metrik Interaksi Publik Skala Logaritmik scripts/06_validate_and_analyze.py (2026).

Gambar 3 mendemonstrasikan perbandingan akumulasi interaksi publik berupa tanda suka (*likes*) dan penyebaran ulang (*retweets*) di seluruh kluster wacana dengan menggunakan skala logaritmik. Penyajian dalam skala logaritmik diperlukan untuk menangani disparitas distribusi interaksi media sosial yang mengikuti hukum distribusi daya (*power-law distribution*). Data memperlihatkan bahwa Kluster T3 (*Apatisme Partisipasi*) dan Kluster T4 (*Wacana Terapeutik*) mencatatkan total keterlibatan publik tertinggi, dengan akumulasi *likes* melampaui ratusan ribu interaksi.

Analisis komparatif antara metrik *likes* dan *retweets* mengungkapkan karakteristik penerimaan publik yang sangat menarik. Pada Kluster T0 (*Tone-Policing Protes*) dan T1 (*Neoliberal Responsibilization*), rasio antara *likes* dan *retweets* memperlihatkan kecenderungan persetujuan pasif: pengguna media sosial cenderung memberikan tanda suka dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada melakukan *retweet*. Hal ini mengindikasikan bahwa pesan-pesan yang menuntut warga untuk 'jangan menyalahkan pemerintah' dan 'mending cari duit' bekerja sebagai norma moral yang diinternalisasi secara privat oleh warganet tanpa harus dikampanyekan secara terbuka di profil mereka.

Tingginya resonansi pada Kluster T4 (*Wacana Terapeutik*) membuktikan bahwa retorika kesehatan mental memiliki daya tarik emosional yang luar biasa di Platform X. Konten-konten yang menawarkan anjuran *self-healing* di tengah berita kekacauan politik negara memperoleh amplifikasi organik yang sangat masif. Bukti empiris ini mengonfirmasi bagaimana etika kepasrahan bertransformasi menjadi pasifikasi kewargaan di ruang digital: wacana terapeutik berhasil memenangkan persaingan algoritma perhatian (*attention economy*) di lini masa, sehingga secara perlahan mengikis visibilitas wacana advokasi kebijakan publik yang membutuhkan pembacaan kritis dan konsolidasi aksi kolektif.

G. Tipologi Aktor dan Ekologi Difusi Wacana di Platform Digital



Gambar 4. Profil Tipologi Aktor Penyebar Wacana di Platform X

Sumber: Hasil Klasifikasi Akun Verifikasi Resmi vs Organik scripts/06_validate_and_analyze.py (2026).

Gambar 4 memetakan tipologi profil aktor penyebar wacana pasifikasi di Platform X, yang diklasifikasikan berdasarkan status kepemilikan lencana verifikasi (*author verified* / centang biru) berbanding akun publik biasa (*organik non-verified*). Dari 7.195 cuitan yang dianalisis, mayoritas mutlak sebesar 97,2% (6.996 cuitan) disebar oleh akun organik tanpa verifikasi, sedangkan akun terverifikasi hanya mencakup 2,8% (199 cuitan).

Meskipun akun centang biru hanya menyumbang proporsi numerik yang kecil (2,8%), analisis mendalam terhadap pengaruh diskursif menunjukkan bahwa akun-akun ini memegang peran sebagai *pemberi umpan gagasan* (*opinion leaders*). Akun centang biru dalam korpus ini mencakup figur publik, pembuat konten pengembangan diri (*self-improvement creators*), konsultan keuangan, dan akun kurasi kutipan stoikisme populer. Cuitan orisinal dari akun-akun inilah yang kerap kali memicu percakapan awal mengenai anjuran '*circle of control*' dan '*frugal living*' sebelum kemudian diadopsi, direproduksi, dan diamplifikasi secara luas oleh puluhan ribu akun biasa.

Dominasi masif akun organik (97,2%) mengonfirmasi temuan paling krusial dari penelitian ini: depolitisasi wacana kebijakan publik di Indonesia telah berhasil bertransformasi dari sekadar propaganda terarah menjadi *hegemoni kesadaran umum* (*common sense hegemony*). Pasifikasi politik tidak lagi harus didorong melalui operasi akun pendongeng bayaran (*cyber-troops*), melainkan telah terinternalisasi ke dalam alam bawah sadar masyarakat luas. Warganet secara sukarela mereproduksi narasi kepasrahan, saling menasihati untuk tidak marah kepada negara, dan menertibkan sesama warga yang masih gigih melancarkan kritik kebijakan.

H. Mekanisme Depolitisasi Tata Kelola dan Erosi Partisipasi Kewargaan

Tabel V. Matriks Mekanisme Depolitisasi Tata Kelola dan Dampak Pasifikasi Kewargaan

Mekanisme Depolitisasi	Landasan Teoretis Rujukan	Bentuk Wacana Empiris di Platform X	Pergeseran Arena Diskursif	Dampak terhadap Tata Kelola	Dampak terhadap Partisipasi Warga
Neoliberal Responsibilization	Nikolas Rose (1999); Ronald	Narasi 'jangan salahkan pemerintah,	Dari akuntabilitas negara di ruang	Pemerintah terbebas dari	Warga terpasifikasi, menginternalisasi

Mekanisme Depolitisasi	Landasan Teoretis Rujukan	Bentuk Wacana Empiris di Platform X	Pergeseran Arena Diskursif	Dampak terhadap Tata Kelola	Dampak terhadap Partisipasi Warga
	Purser (2019)	perbaiki diri sendiri, salahkan diri sendiri kalau miskin'	publik → beban adaptasi psikologis individu	keharusan mengevaluasi dampak regulasi fiskal dan bantuan sosial	kegagalan sistemik regulasi sebagai nasib/dosa pribadi
Discursive Arena-Shifting	Matthew Flinders & Jim Buller (2006)	Narasi stoikisme pop ('fokus pada lingkaran kendali / <i>circle of control</i> ')	Dari perdebatan hak-hak kewargaan → batas kendali psikis personal	Penurunan drastis tuntutan transparansi anggaran dan akuntabilitas kebijakan publik	Kritik kebijakan didevaluasi sebagai tindakan 'tidak rasional dan kekanak-kanakan'
Affective Pacification / Tone-Policing	Zizi Papacharissi (2015); Colin Hay (2007)	Seruan 'ngapain demo mending cari duit' dan kecaman terhadap aksi protes jalanan	Dari aksi kolektif kewargaan → kalkulasi rasionalitas ekonomi pragmatis	Stabilitas kekuasaan status quo terjaga tanpa perlu konsolidasi deliberasi demokratis	Solidaritas aksi protes kolektif terfragmentasi dan kehilangan daya tawar penekan
Therapeutic Pacification & Fatalism	Frank Furedi (2004); Cabanas & Illouz (2019)	Wacana ' <i>self-healing</i> ' dan 'terima kenyataan' menghadapi krisis biaya hidup	Dari resolusi struktural kebijakan → katarsis emosional privat	Krisis tata kelola terabaikan tanpa pembenahan institusional mendasar	Partisipasi demokratis aktif digantikan oleh kepatuhan fatalistik yang melumpuhkan

Sumber: Hasil Sintesis Kerangka Teoretis dan Analisis Tata Kelola Pemerintahan (2026).

Tabel V memetakan sintesis komprehensif mengenai bekerjanya empat mekanisme depolitisasi tata kelola di Platform X dalam mereduksi resistensi publik terhadap kebijakan negara. Mekanisme pertama, *Neoliberal Responsibilization*, berlandaskan teori Nikolas Rose (1999) dan Ronald Purser (2019). Dalam wacana empiris, mekanisme ini mewujudkan pada glorifikasi kemandirian ekstrem dan larangan menyalahkan penguasa. Dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan sangat merusak: institusi kementerian dan lembaga legislatif terbebaskan dari tekanan untuk mengevaluasi distorsi regulasi (seperti kenaikan PPN 12% dan pungutan Tapera), karena warganet telah terpasifikasi untuk meyakini bahwa keterpurukan ekonomi keluarga adalah buah dari ketidakmampuan manajerial diri mereka sendiri.

Mekanisme kedua, *Discursive Arena-Shifting* (Flinders & Buller, 2006), bekerja dengan mengadopsi dikotomi stoikisme klasik antara 'hal yang bisa dikendalikan' dan 'hal yang tidak bisa dikendalikan'. Dalam manipulasi diskursif ini, kebijakan negara, undang-undang, dan pemungutan pajak dikategorikan sebagai domain eksternal yang mustahil dikendalikan oleh rakyat biasa, sehingga warga dianjurkan untuk hanya fokus pada lingkup kendali mikro (mentalitas dan ketenangan pribadi). Akibatnya, fungsi pengawasan publik kolaps, dan kritik warga dicap sebagai perilaku membuang-buang energi yang tidak rasional.

Mekanisme ketiga dan keempat, *Affective Pacification / Tone-Policing* (Papacharissi, 2015; Hay, 2007) serta *Therapeutic Pacification* (Furedi, 2004; Cabanas & Illouz, 2019), secara simultan melucuti amarah kolektif masyarakat. Dengan menggantikan tuntutan reformasi institusional menjadi anjuran terapi kejiwaan (*self-healing*), resistensi warga berhasil dijinakkan tanpa memerlukan represi fisik dari aparat keamanan negara. Secara keseluruhan, temuan empiris pada Tabel V mengonfirmasi tesis sentral artikel ini: wacana *mindfulness* di Platform X telah bertransformasi menjadi apparatus depolitisasi canggih yang mereduksi partisipasi kewargaan dari pilar penegak demokrasi menjadi kepatuhan fatalistik.

Pembahasan

1. *Neoliberal Responsibilization: Personalisasi Kegagalan Kebijakan Negara*

Temuan empiris pada Kluster T1 (13,7%) dan matriks *framing* Entman membuktikan secara gamblang bekerjanya doktrin *responsibilization* neoliberal di ruang digital Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Rose (1999) dan Foucault (2008), kekuasaan modern tidak lagi menuntut ketaatan warga melalui dekrit otoriter, melainkan melalui penanaman etika swa-kelola (*self-governance*). Ketika warganet menggemakan narasi 'jangan salahkan pemerintah,

salahin diri sendiri', mereka secara sukarela membebaskan negara dari kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945). Beban sistemik akibat kebijakan fiskal yang kontraksi seperti kenaikan tarif PPN 12% di tengah stagnasi upah riil kelas menengah diterjemahkan ulang sebagai konsekuensi logis dari gaya hidup konsumtif dan ketidakmampuan berhemat.

Fenomena ini memperkuat kritik Ronald Purser (2019) mengenai bahaya '*McMindfulness*'. Purser mengidentifikasi bahwa industri pengembangan diri dan ketenangan batin bertindak sebagai instrumen ideologis kapitalisme mutakhir yang memprivatisasi stres dan penderitaan sosial. Ketika stres akibat beban biaya hidup dan pajak dipandang sebagai problem kimiawi otak yang harus diselesaikan melalui meditasi atau terapi, maka sumber penderitaan yang sesungguhnya yaitu kebijakan ekstraktif dan korupsi alokasi APBN menjadi tak terlihat (*invisible*). Di Indonesia, kooptasi retorika ketenangan batin ini menciptakan benteng pertahanan diskursif bagi para pengambil kebijakan: pemerintah dapat terus meloloskan regulasi yang tidak populer dengan asumsi bahwa masyarakat sipil akan secara mandiri mengelola kepedihannya melalui retorika kepasrahan dan perbaikan kapasitas individu.

2. Discursive Arena-Shifting: Transformasi Isu Kebijakan Publik Menjadi Urusan Kendali Privat

Analisis mendalam terhadap Kluster T0, T2, dan T4 membuktikan terjadinya mekanisme *discursive arena-shifting* yang dirumuskan oleh Flinders dan Buller (2006). Dalam teori depolitisasi klasik, pergeseran arena biasanya dikaitkan dengan pemindahan wewenang dari menteri ke bank sentral independen atau komite teknokratik. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bentuk pergeseran arena yang jauh lebih radikal dan cair: pergeseran arena dari ranah akuntabilitas kebijakan publik di ruang terbuka ke ranah kendali psikologis privat warga negara. Penyalahgunaan konsep stoikisme 'lingkaran kendali' (*circle of control*) oleh para pembuat konten di Platform X melegitimasi gagasan bahwa mengkritik presiden, memprotes menteri keuangan, atau menuntut transparansi DPR adalah tindakan yang keliru karena berada di luar lingkaran kendali personal.

Pemberlakuan dikotomi kendali ini melumpuhkan fondasi demokrasi perwakilan. Sebagaimana diperingatkan oleh Colin Hay (2007) dan Wood dan Flinders (2014), esensi dari politik demokratis adalah upaya kolektif warga negara untuk mengubah hal-hal yang sebelumnya dianggap berada 'di luar kendali' menjadi 'dalam kendali' melalui konsolidasi kekuasaan rakyat. Ketika batas lingkaran kendali diciutkan hanya sebatas kamar tidur, tempat kerja, dan pikiran pribadi, maka partisipasi politik secara efektif dimatikan. Warga negara didepolitisasi bukan karena mereka dilarang berbicara oleh undang-undang darurat, melainkan karena mereka telah diyakinkan oleh etika stoikisme populer bahwa mengurus kebijakan negara adalah kesia-siaan eksistensial yang mengganggu ketenangan jiwa.

3. Affective Pacification dan Erosi Partisipasi Deliberatif: Tone-Policing di Ruang Digital

Korelasi temporal antara lonjakan wacana pasifikasi dengan gelombang unjuk rasa nasional (UU Cipta Kerja $Z = 8,05$, Peringatan Darurat $Z = 7,56$) mengonfirmasi bekerjanya pasifikasi afektif (*affective pacification*). Papacharissi (2015) menekankan bahwa mobilisasi gerakan sosial digital sangat bergantung pada resonansi amarah kolektif (*affective publics*). Amarah adalah bahan bakar moral yang mendorong warganet untuk melangkah dari sekadar menyukai postingan menuju keterlibatan aktif dalam aksi protes jalanan atau advokasi hukum. Namun, temuan pada Kluster T0 memperlihatkan bahwa wacana *tone-policing* secara aktif memadamkan amarah moral tersebut.

Narasi 'ngapain demo mending cari duit' memecah belah solidaritas kelas pekerja dan mahasiswa dengan membenturkan moralitas aksi kolektif melawan rasionalitas kelangsungan hidup ekonomi keluarga. *Tone-policing* bekerja dengan mendelegitimasi para pengunjuk rasa sebagai perusuh yang mengganggu ketertiban umum dan membebani aparat keamanan. Menurut Frank Furedi (2004) dalam *Therapy Culture*, dominasi budaya terapi mengubah persepsi masyarakat terhadap kemarahan politik: amarah tidak lagi dipandang sebagai ekspresi keadilan, melainkan sebagai patologi psikologis yang harus disembuhkan. Akibatnya, ruang

publik deliberatif di Platform X kehilangan daya tawar penekannya (*coercive power*), sehingga protes terhadap kebijakan ekstraktif negara mereda sebelum berhasil memaksa pemerintah membatalkan regulasi tersebut.

4. Dialektika Perlawanan Pasif: Paradoks Frugal Living sebagai Kepatuhan vs Boikot Ekonomi

Di balik dominasi wacana pasifikasi, analisis hermeneutik mendalam pada Kluster T2 dan T3 menemukan anomali diskursif yang sangat penting: dialektika perlawanan pasif (*passive resistance dialectic*). Pada saat polemik kenaikan PPN 12% meledak pada November 2024, narasi *frugal living* (gaya hidup hemat ekstrem) dan *mindful spending* (belanja berkesadaran) tidak hanya diartikulasikan sebagai kepasrahan fatalistik, melainkan direartikulasi oleh sebagian warganet sebagai instrumen sabotase ekonomi terhadap kas negara.

Warganet menyerukan pemogokan konsumsi massal dengan pernyataan viral: '*Yuk frugal living ekstrem, biar kita kasih neraka ke pemerintah, bagaimana efeknya kalau uang belanja seret dan penerimaan pajak anjlok*'. Fenomena ini merefleksikan apa yang dalam sosiologi politik disebut James C. Scott (1985) sebagai *weapons of the weak* (senjata kaum tertindas). Ketika saluran aspirasi deliberatif formal tersumbat dan aksi demonstrasi fisik di jalanan dihadapi oleh kekerasan aparat serta stigma *tone-policing*, warga beralih ke bentuk resistensi sehari-hari yang terselubung. Etika penghematan yang semula didesain oleh narasi neoliberal untuk meredakan protes, justru diputarbalikkan menjadi strategi boikot ekonomi (*starving the beast*) untuk menekan target penerimaan pajak rezim penguasa. Temuan ini membuktikan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya pasif, melainkan medan pertempuran hegemoni yang cair dan kontradiktif.

5. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Komunikasi Publik di Indonesia

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kritis bagi studi Ilmu Pemerintahan dan perumusan kebijakan publik di Indonesia. Pertama, keberhasilan wacana pasifikasi dalam meredakan resistensi warga menciptakan ilusi stabilitas tata kelola (*illusion of governance stability*). Pemerintah mungkin merasa berhasil menjaga ketertiban umum karena ketiadaan demonstrasi besar pasca-penetapan regulasi kontroversial; namun stabilitas semu ini dibayar dengan ongkos yang sangat mahal, yaitu meluasnya sinisme politik dan apatisme kewargaan (Kluster T3, 38,5%). Ketika warga memutuskan untuk bersikap 'bodo amat' dan menarik diri dari keterlibatan publik, legitimasi demokratis negara runtuh dari dalam.

Kedua, dari sudut pandang Ilmu Komunikasi, penelitian ini membuktikan bahwa ruang publik digital Indonesia tengah mengalami krisis deliberasi yang akut. Media sosial yang semula diharapkan menjadi katalisator transparansi tata kelola kini bergeser menjadi instrumen anestesi massal. Apabila kecenderungan depolitisasi berbasis psikologi populer ini terus dinormalisasi, masyarakat sipil Indonesia akan kehilangan kapasitas pengawasan kritisnya, dan relasi antara negara dan rakyat akan tereduksi menjadi relasi ekstraktif sepihak di mana warga hanya diposisikan sebagai objek kebijakan yang dituntut untuk selalu bersabar, bermeditasi, dan menanggung sendiri seluruh dampak kegagalan tata kelola negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini secara tuntas mengungkap bagaimana wacana *mindfulness*, stoikisme populer, dan etika ketenangan batin di Platform X beroperasi sebagai instrumen depolitisasi kebijakan publik di Indonesia. Melalui kerangka *Computational Grounded Theory* pada korpus 7.195 cuitan bersih periode 2014–2026, penelitian ini menyimpulkan dua temuan fundamental yakni Struktur Diskursif dan Pembingkai Realitas Kebijakan: Konfigurasi wacana terstruktur secara konsisten ke dalam lima kluster tematik *c-TF-IDF* yang didominasi oleh Apatisme Partisipasi (38,5%) dan Wacana Terapeutik (28,9%). Rekonstruksi pembingkai model Robert Entman membuktikan bahwa wacana ini secara sistematis mempersonalisasi kegagalan kebijakan negara menjadi problem kesehatan mental individu, mendiagnosis penyebab penderitaan pada kelemahan karakter warga, menjatuhkan sanksi moral terhadap aksi protes, dan merekomendasikan solusi soliter berbasis pengelolaan batin. Secara temporal, lonjakan

wacana pasifikasi terbukti signifikan ($Z > 2,0$; $p < 0,05$) bertepatan persis dengan momen guncangan regulasi nasional (UU Cipta Kerja, Peringatan Darurat RUU Pilkada, dan PPN 12%). Kemudian Depolitisasi Tata Kelola dan Pasifikasi Partisipasi Publik: Wacana *mindfulness* bertransformasi menjadi instrumen depolitisasi tata kelola melalui mekanisme *discursive arena-shifting* dan *neoliberal responsabilization*. Wacana ini memindahkan arena perdebatan dari akuntabilitas institusi publik ke lingkaran kendali privat warganegara, membebaskan pemerintah dari evaluasi dampak kebijakan, dan menjinakkan amarah afektif publik melalui *tone-policing*. Pasifikasi kewargaan ini telah mengikis partisipasi demokratis dan menumbuhkan kepatuhan fatalistik. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat resistensi dialektis di mana sebagian masyarakat sipil mereartikulasi gaya hidup hemat (*frugal living*) sebagai instrumen boikot ekonomi alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2026, 24 Agustus). *Kebakaran hutan picu krisis kesehatan warga* [Siaran pers]. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kebakaran-hutan-picu-krisis-kesehatan-warga/08/2026/>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. (2024). *Laporan survei pengguna internet Indonesia 2024*. APJII. <https://apjii.or.id/survei>
- Association of Internet Researchers [AoIR]. (2020). *Internet research: Ethical guidelines 3.0*. In A. S. Franzke, A. Bechmann, M. Zimmer, C. Ess, & the Association of Internet Researchers (Eds.). AoIR Publishing. <https://aoir.org/reports/ethics3.pdf>
- Ayunda, M. (2026, 21 Agustus). *Mindfulness in the age of bad news* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=r1DSH9AQXLU>
- Bessi, A., & Ferrara, E. (2016). Social bots distort the 2016 US Presidential election online discussion. *First Monday*, 21(11). <https://doi.org/10.5210/fm.v21i11.7090>
- Cabanias, E., & Illouz, E. (2019). *Manufacturing happy citizens: How the science and industry of happiness control our lives*. Polity Press.
- Ceron, A., Curini, L., & Iacus, S. M. (2016). *Politics and social media: Big data, opinion mining and text analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315601243>
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power* (2nd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190696726.001.0001>
- DataReportal. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. Hootsuite & We Are Social. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Davies, W. (2015). *The happiness industry: How the government and big business sold us well-being*. Verso Books.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Flinders, M., & Buller, J. (2006). Depoliticisation: Principles, tactics and tools. *British Politics*, 1(3), 293–318. <https://doi.org/10.1057/palgrave.bp.4200016>
- Foucault, M. (2008). *The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979* (M. Senellart, Ed.; G. Burchell, Trans.). Palgrave Macmillan.
- Furedi, F. (2004). *Therapy culture: Cultivating vulnerability in an uncertain age*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203392461>
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05794>
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)

- Han, B.-C. (2017). *Psychopolitics: Neoliberalism and new technologies of power* (E. Butler, Trans.). Verso Books.
- Hapsari, R. K. (2026, 15 September). Kronologi Maudy Ayunda dihujat netizen di X soal video mindfulness. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5741579/kronologi-maudy-ayunda-dihujat-netizen-di-x-soal-video-mindfulness>
- Hay, C. (2007). *Why we hate politics*. Polity Press.
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition* (3rd ed. draft). Stanford University.
- Khaerunnisa, R. (2022, 22 April). Kominfo: Penunjukan Maudy sebagai jubir G20 untuk jangkau milenial. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/2837629/kominfo-penunjukan-maudy-sebagai-jubir-g20-untuk-jangkau-milenial>
- Koto, F., Rahimi, A., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2021). IndoBERTweet: A pretrained language model for Indonesian Twitter with effective domain-specific vocabulary initialization. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)* (pp. 10660–10668). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.emnlp-main.833>
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174. <https://doi.org/10.2307/2529310>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociological Methods & Research*, 49(1), 3–42. <https://doi.org/10.1177/0049124117729703>
- Nugroho, Y., & Syarief, S. S. (2012). *Beyond clicktivism: New media and citizenship in Indonesia*. Friedrich-Ebert-Stiftung & Centre for Innovation Policy and Governance.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199999736.001.0001>
- Purser, R. (2019). *McMindfulness: How mindfulness became the new capitalist spirituality*. Repeater Books.
- Rachmat, B. (2026, 20 September). Tuai kritik karena konten “mindfulness”, Maudy Ayunda kembali minta maaf dan akui masih harus belajar. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/hiburan/montase/8ko1ValN-tuai-kritik-karena-konten-mindfulness-maudy-ayunda-kembali-minta-maaf-dan-akui-masih-harus-belajar>
- Rahman, A. F. (2026, 14 September). Maudy Ayunda dirujuk netizen negara video mindfulness, kenapa? *detikNet*. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-8662383/maudy-ayunda-dirujuk-netizen-negara-video-mindfulness-kenapa>
- Rose, N. (1999). *Powers of freedom: Reframing political thought*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511488856>
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital realm*. Rowman & Littlefield.
- Vannini, P. (2016). *Non-representational methodologies: Re-envisioning research*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315886473>

- Wahyuningtyas, P. (2026, 14 September). Konten mindfulness Maudy Ayunda dikritik, apa yang dipersoalkan? *Tirto.id*. <https://tirto.id/konten-mindfulness-maudy-ayunda-dikritik-apa-yang-dipersoalkan-hCRY>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making* (Council of Europe Report DGI(2017)09). Council of Europe.
- Wardyah, N. S. (2026, 13 September). Sistem ganjil genap BBM subsidi berlaku untuk kendalikan antrean. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5738991/sistem-ganjil-genap-bbm-subsidi-berlaku-untuk-kendalikan-antrean>
- Wood, M., & Flinders, M. (2014). Rethinking depoliticisation: Beyond the governmental. *Policy & Politics*, 42(2), 151–170. <https://doi.org/10.1332/030557312X655909>